BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, baik perubahan yang cepat maupun perubahan yang lambat. Perubahan masyarakat bisa terjadi dari bentuk kehidupan masyarakat yang sederhana hingga bentuk masyarakat yang kompleks. Perkembangan teknologi dan modernisasi dapat mengakibatkan terbentuknya pola hidup baru dalam masyarakat. Terutama pada masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Pada negara-negara yang sedang berkembang, dengan adanya modernisasi mengakibatkan terjadinya transisi dalam kehidupan masyarakat dari bentuk tradisional menuju bentuk modern.¹

Dalam kehidupan masyarakat modern, kita dapat melihat pola hidup dan perilaku sebagian masyarakat yang tampak berbeda dengan pola hidup dan perilaku yang biasa dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat tradisional pada umumnya. Proses perubahan kehidupan manusia dapat diketahui dari sejak awal dunia dihuni manusia hingga dewasa ini. Alvin Toffler seperti yang dikutip Dwiningrum, menganalisis gejala-gejala perubahan dan pembaruan peradaban manusia adalah akibat kemajuan ilmu teknologi.²

¹ Muzaini, 2014, **Perkembangan Teknologi Dan Perilaku Menyimpang Dalam Masyarakat Modern**, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 12, No.1 hlm.4.

² Dwiningrum, Siti Irene Astuti, 2012, **Ilmu Sosial dan Budaya Dasar**, UNY Press, Yogyakarta, hlm. 45.

Teknologi merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat yang sedang berkembang. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi semakin berjalan cepat dan pesat sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat modern. Ditengah meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka dibarengi juga dengan meningkatkan hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Negara memiliki tugas untuk melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan warga negara, sebaliknya atas perlindungan tersebut, masyarakat suatu negara memiliki juga hak dan kewajiban terhadap negara, salah satunya melalui pajak.

Perkembangan teknologi terkait dengan proses modernisasi yang sedang berjalan di berbagai belahan dunia, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.³ Sebagai contoh adalah perkembangan teknologi di bidang transportasi, pada zaman dahulu transportasi masih menggunakan bantuan hewan sebagai moda penggerak, namun seiring perkembangan teknologi sekarang, transportasi sudah menggunakan mesin. Dengan adanya perkembangan teknologi dibidang transportasi, maka dapat membantu mobilitas penyelenggaraan negara.

Sarana transportasi dimanfaatkan untuk mendistribusikan barang, dan melayani jasa pengangkutan orang, dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan Sistem transportasi nasional memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan, dan menjadi penghubung antara daerah yang sudah

³ Anis Maria, 2019, **Aspek Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia**, Jurnal Bina Mulia Hukum Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Vol. 3, No. 2, hlm.177.

maju dengan daerah yang masih terisolasi, sehingga dapat terciptanya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Perkembangan dunia bisnis pada sektor jasa, semakin meningkat saat ini. Perkembangan ini dapat diamati pada aktivitas sehari-hari, sebagian besar aktivitas tersebut tidak bisa lepas dari penggunaan atau peranan dari berbagai sektor jasa.⁴

Salah satu sektor jasa yang memiliki peranan cukup vital dalam menunjang berbagai aktivitas sehari-hari adalah sektor jasa transportasi. Transportasi merupakan sarana perkembangan yang penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta memengaruhi semua aspek kehidupan. Pentingnya transportasi tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang, sebagai akibat meningkatnya perkembangan penduduk dan pemukiman yang semakin luas terutama dikota-kota besar.

Perubahan pola hidup yang konsumtif dalam masyarakat berdampak pada terciptanya kebebasan individual. Bentuk-bentuk individualisasi ini dapat ditemukan diberbagai sektor atau bidang, misalnya pada sarana transportasi yang merupakan pergerakan mobilitas masyarakat ditandai dengan kepemilikan transportasi pribadi. Maka tidak heran bahwa kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang disajikan. Untuk mengawasi dan melindungi pola konsumtif masyarakat pada sarana transportasi, maka sektor ini tidak terlepas dari pemebanan pajak. Dengan adanya pajak disegala sektor kehidupan masyarakat, salah satunya

⁴ Muh Kadarisman, 2017, **Kebijakan Transportasi Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Dalam Mewujudkan Angkutan Ramah Lingkungan**, Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, Vol. 04, No. 03. hlm.8.

transportasi, maka masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak bagi kelangsungan pembangunan Negara sangatlah penting. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-Undangan. Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.⁵ Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi *tax coverage* (lingkup/cakupan pajak) sekaligus menekankan *tax compliance* (kepatuhan pajak) masyarakat. Dalam rangka mewujudkan suatu pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) diperlukan adanya ketersediaan dana yang besar.

Pemerintah dalam hal ini sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk dapat mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri. Hal ini tidak terlepas dari asas otonomi daerah yang dianut oleh pemerintahan Indonesia. Pemberian otonomi yang luas diyakini mampu mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Bahkan, secara ideal otonomi daerah dapat menciptakan pembangunan daerah yang berkeadilan.⁶ Pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai,

⁵ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, 2015, **Pengantar Hukum Indonesia**, Cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 169

⁶ SF. Marbun, 2012, **Hukum Administasi Negara**, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 139

karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit.⁷

Di keluarkannya UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan di sisi penerimaan (*tax policy*) dalam rangka memperkuat kemampuan membiayai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan penerimaan. Dengan kata lain, untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, tiap daerah berhak membebankan pungutan biaya kepada masyarakat yang berupa pajak.⁸

Wewenang mengenakan pungutan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintahan daerah. Di Indonesia, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan mengenakan pajak, meskipun jumlah penerimaan pajak daerah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia ada dua jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Namun terdapat dua pembagian jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas: a. Pajak kendaraan bermotor; b. bea balik nama kendaraan

⁷ Yani Rizal dan Miftahul Hidayah, 2016, **Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh**, Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis rodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, Vol. 9, No.1, hlm.85.

⁸ *Ibid*, hal.84.

bermotor; dan c. Pajak air permukaan. Sedangkan jenis pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan b. Pajak rokok.

Masalah semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah atas hingga menengah bawah semakin terpacu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki ialah alat transportasi. Alat transportasi ini sebagai alat penunjang dalam kegiatan sehari-hari. Alat transportasi ini juga bukan menjadi kebutuhan mewah tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah. Bertambahnya kendaraan bermotor mengakibatkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat di setiap tahunnya. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini akan berdampak besar pada kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Pajak kendaraan bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Zuraida menyatakan bahwa Pajak Kendaraan bermotor adalah bagian pajak daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi.⁹ Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda

⁹ Anis Syamsu Rizal, 2019, **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaranwajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotordan Sistem Samsatdrive Thruterhadapkepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**, Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, Vol. 7, No. 1, hlm..79.

beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.¹⁰ Pajak kendaraan bermotor dapat digolongkan ke dalam tipe pajak langsung, karena memenuhi ciri khas pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak kendaraan bermotor ini dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik) dan pajak ini di pungut setiap tahun.¹¹

Namun pada masa sekarang perekonomian negara mengalami penurunan, begitupula daya pembayaran pajak. Masuknya *Corona Virus Disease* 2019 atau yang lebih dikenal dengan *Covid-19* ke Indonesia menjadi masalah utama penurunan angka pembayaran pajak kendaraan bermotor. Terjadinya upaya tarik menarik antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus menjadi sorotan dalam bidang penanganan *Covid-19*. *Covid-19* adalah penyakit menular yang ditemukan pada Desember 2019 di Kota Wuhan, Tiongkok. Covid-19 biasanya menyerang saluran pernapasann, ditandai dari flu biasa, batuk hingga penyakit serius seperti *Middle Eas Respiratory Syndrome* (MERS) ataupun sindrom pernapasan akut berat yang biasanya disebut *Serve Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit ini telah menyebar

¹⁰ Wa Ode Aswati ,Arifuddin Mas'ud, dan Tuti Nurdianti Nudi, 2018, **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna)**, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3, No.1, hlm.29.

¹¹ Mustaqiem, 2008, **Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah**, FH UII Press, cetakan pertama, hlm. 289

keseluruh dunia dan pertama kali dilaporkan telah masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Penyebaran virus sangat cepat sehingga menjadikan *Covid-19* sebagai *problem global* yang utama.¹²

Penyebaran *Covid-19* di Indonesia telah membawa dampak pada perekonomian negara. Akibat dari penurunan perekonomian negara ini, Bank Indonesia mencermati perkembangan ekonomi global dan domestic untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi.¹³ Penurunan perekonomian Indonesia salah satunya ditandai dengan turunnya tingkat penerimaan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu sektor penerimaan pajak yang sangat bersampak adalah pada pajak kendaraan bermotor.

Bali yang merupakan provinsi yang menerima dampak *Covid-19* yang sangat berat, ditutupnya akses dan mobilitas pariwisata menjadi salah satu faktor penurunan perekonomian Bali, sehingga berakibat pada penurunan angka pembayaran pajak bermotor. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Bali No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya, menjadi Peraturan Daerah Bali No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Selanjutnya disebut Perda Pajak Daerah Prov. Bali), menyatakan lima jenis pajak yang dibebankan pada daerah provinsi Bali, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor.

¹² Ririn Noviyanti Putri, 2020, **Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19**, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 20, No.2, hlm.708.

¹³ Silpa Hanoatubun, 2020, **Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia**, Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 2, No.1 hlm.149.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali tahun 2020 adalah 4.460.158 unit, dan jumlah ini akan meningkat sepanjang tahun.¹⁴ Kabupaten Gianyar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali menyumbang angka 470.076 unit kendaraan bermotor dalam data tersebut.¹⁵ Setahun setelah masuknya *Covid-19* di Indonesia, Kabupaten Gianyar sebagai salah satu Kabupaten yang terdampak juga mengalami kesulitan dalam pemasukan perpajakan daerah, khususnya pada pajak kendaraan bermotor.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Selanjutnya disebut Perpres SAMSAT) adalah kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (selanjutnya disebut SAMSAT) atau dalam bahasa Inggris *one roof system*. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu

¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020, **Banyak Kendaraan Menurut Jenisnyad an Kabupaten Kota di Provinsi Bali**, <https://bali.bps.go.id/indicator/17/250/1/banyaknya-kendaraan-menurut-jenisnya-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html>, diakses pada 13 Oktober 2021.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020, **Jumlah Kendaraan menurut Wilayah di Bali**, <https://bali.bps.go.id/indicator/17/248/1/jumlah-kendaraan-menurut-wilayah.html>, diakses pada 13 Oktober 2021.

Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.¹⁶

Permasalahan terganggunya pembayaran pajak pasca pandemi *Covid-19* berimbas kepada terganggunya pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar yang berakibat pada penurunan anggaran pendapatan daerah. Sehingga diperlukan adanya peran pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor di daerah Kabupaten Gianyar, salah satunya melalui SAMSAT Kabupaten Gianyar sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Melalui SAMSAT Kabupaten Gianyar, pemerintah daerah Kabupaten Gianyar harus memiliki inovasi dalam menetapkan kebijakan bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak pasca pandemic *Covid-19*.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan melakukan penelusuran secara mendalam terhadap permasalahan diatas dengan tulisan yang berjudul "**Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam Meningkatkan Kesadaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi *Covid-19***".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti kemukakan yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Setyani Sri Haryanti dan Kurniawan Aji Wijaya, 20109, **Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**, Jurnal Ekonomi dan Perbankan STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta, Vol.4, No.2, hlm.152.

1. Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi *covid-19*?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kabupaten gianyar dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi *covid-19*?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk membatasi penelitian ini, maka sangat diperlukan adanya ruang lingkup masalah agar penelitian ini dapat lebih terarah dan mengkhusus. Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Dalam pembahasan masalah pertama, penulis akan membahas mengenai peran pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi *covid-19*.
- 2) Dalam pembahasan masalah kedua, penulis akan membahas mengenai Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kabupaten gianyar dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi *covid-19*.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

- 1) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 2) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

- 3) Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi *covid-19*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kabupaten gianyar dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi *covid-19*.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum empiris karena yang diteliti adalah permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* yang ada, yaitu mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam Meningkatkan Kesadaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi *Covid-19*.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan beberapa jenis Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Pendekatan sosiologi hukum

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.95

merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁸ Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor pasca pandemi *covid-19* (studi kasus Kantor Samsat Kabupaten Gianyar).

1.5.3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Hukum Primer, yakni data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian di lapangan atau dari sumber pertama baik berupa responden maupun informan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di Kantor Samsat Kabupaten Gianyar. Adapun sumber data primer merupakan sumber data mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam Meningkatkan Kesadaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi *Covid-19*
2. Data Hukum Sekunder yakni data yang bersumber dari kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung oleh sumber pertamanya, melainkan sumber data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹⁸ *Ibid*, hlm.87.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, jenis Pajak Provinsi, Peraturan Daerah Bali No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya, menjadi Peraturan Daerah Bali No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Gubernur No.8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2020 tentang Pengurang/Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2020 tentang Pengurang/Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur atau buku yang relevan dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian serta bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁹ Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: pendapat para ahli hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, dan buku-buku hukum yang membahas mengenai pajak kendaraan bermotor.
3. Data hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu data-data yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.²⁰

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Teknik yang digunakan dalam setiap penelitian hukum, baik penelitian hukum normative maupun penelitian hukum empiris. Adapun dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu :

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau *interview* merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak informan di lapangan. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimentri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 53.

²⁰ Bambang Sunggono, 2015, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.185.

yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan topic permasalahan dalam penelitian kepada responden.²¹

b. Teknik Observasi

Penelitian ini juga melakukan metode observasi yang dimana melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

1.5.5. Teknik Analisis data

Teknik Analisis yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.²²

²¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.82.

²² Muhaimin, *Op.Cit*, hlm.106.

1.6. Sistematika Penulisan

1.6.1. BAB I

Bab I membahas mengenai latar belakang Skripsi ini yang berawal dari Permasalahan terganggunya pembayaran pajak pasca pandemi *Covid-19* berimbas kepada terganggunya pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar yang berakibat pada penurunan anggaran pendapatan daerah. Sehingga diperlukan adanya peran pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor di daerah Kabupaten Gianyar, salah satunya melalui SAMSAT Kabupaten Gianyar sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Melalui SAMSAT Kabupaten Gianyar, pemerintah daerah Kabupaten Gianyar harus memiliki inovasi dalam menetapkan kebijakan bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak pasca pandemi *Covid-19*.

1.6.2. BAB II

Bab ini membahas mengenai kajian teoritis berupa teori negara hukum, teori kewenangan, teori efektivitas hukum, konsep kesadaran hukum, konsep pajak kendaraan bermotor, dan konsep penegakan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian ini yaitu peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi *Covid-19*.

1.6.3. BAB III

Bab ini membahas mengenai peran pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor

pada masa pandemi *covid-19*. Melalui Kantor Samsat Kabupaten Gianyar, Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar memberikan pelayanan publik dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi *covid-19*. Berdasarkan kedua data pembayaran samsat Kantor Samsat Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 dan tahun 2020 dapat diketahui, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak di Kabupaten Gianyar belum baik. Karena hal tersebut, Kantor Samsat Kabupaten Gianyar melaksanakan beberapa upaya untuk mengatasi hal tersebut, diantaranya adalah dengan sistem *door to door* dan sosialisasi.

1.6.4. BAB IV

Bab ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi *covid-19*. Kendala yang mempengaruhi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar Pasca Pandemi *Covid-19* berupa faktor bencana alam, faktor pendapatan wajib pajak, faktor tingkat Pendidikan wajib pajak, dan faktor kesadaran wajib pajak. Pelaksanaan Sistem *door to door* Pada Kantor Samsat Kabupaten Gianyar dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor hanya dapat mengidentifikasi status kendaraan bermotor dengan baik, sedangkan tujuan untuk menarik pembayaran pajak kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini terlihat lebih besar angka wajib pajak yang berjanji membayar pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan pembayaran / pelunasan langsung pada saat pelaksanaan petugas melaksanakan sistem *door to door* ke rumah wajib pajak, sehingga sistem *door to door* belum

efektif untuk meningkatkan pembayaran pajak di Kabupaten Gianyar. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu 1) Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang); 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

1.6.5. BAB V

Bab ini membahas mengenai penutup berupa kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan berupa Kantor Samsat Kabupaten Gianyar sebagai representasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam mengupayakan peningkatan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui beberapa upaya kebijakan diantaranya melalui sistem *door to door* dan sosialisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar ini melalui Kantor Samsat Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19, juga juga dipengaruhi oleh faktor-faktor. Saran pada penelitian ini adalah diharapkan Pemerintah Kabupaten Gianyar, khususnya Kantor Samsat Kabupaten Gianyar selalu dapat meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor dan diharapkan sistem *door to door* disertai dengan sosialisai terus diperbaiki dan diperbarui oleh Kantor Samsat Kabupaten Gianyar.